

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Paparan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta – benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya masalah sosial lain.¹

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal – hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal – hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak

¹ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1

adanya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaliatif, dan lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah negara berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara- negara yang miskin.

Kemiskinan dapat dipahami dari berbagai sudut dan cara yang berbeda, sedangkan pemahaman yang utama mencakup beberapa hal antara lain :

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari- hari, sandang, papan (perumahan), dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang – barang dan pelayanan dasar.

2. Gambaran tentang kebutuhan social, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak-mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk Pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah – masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai disini sangat berbeda – beda melintasi bagian – bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya *Affluent Society*, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar

ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massa;/kolektif, kemiskinan musiman, dan kemiskinan individu.

Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodic dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental anak -anak yatim, kelompok lanjut usia.

b. Masalah kemiskinan

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak

pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum : pangan, sandang, kesehatan, papan, Pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup d atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat lainya.

Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang

tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.²

c. Jumlah kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSESNAS) bulan maret 2019 sebesar 5,09 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,25 persen. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 14,28 ribu orang dari 668,74 ribu orang pada September 2018 menjadi 654,46 ribu orang pada Maret 2019.

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2019 mencapai 5,09 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2018, maka selama enam bulan terjadi penurunan sebesar 0,16 poin (dari posisi 5,25 persen).

² Devi Arfiani, "Berantas Kemiskinan...h. 5 – 9

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,24 menjadi 4,12 dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 7,67 pada September 2018 menjadi 7,49 pada Maret 2019.³

d. Mengukur kemiskinan

Kemiskinan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira – kira 2000 – 2500 kalori per hari untuk laki – laki dewasa).

Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah

³ Profil Kemiskinan di Banten, “ *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*, (15 Juli 2019) h. 1 – 2.

USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari, dengan Batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 milyar orang di dunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 milyar orang di dunia mengonsumsi kurang kurang dari \$2/hari.⁴

e. Penyebab Kemiskinan

Adapun penyebab kemiskinan, menurut Suharto, paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem

⁴ Devi Arfiani, "*Berantas Kemiskinan*...h. 11 – 12

ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada. Kemiskinan di sebabkan oleh faktor nomor tiga di sebut sebagai kemiskinan kultural, sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keempat disebut sebagai kemiskinan struktural.

Sedangkan menurut Houghton dan Kandker ada empat elemen karakteristik penyebab kemiskinan yang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Karakter Penyebab Kemiskinan

Karakteristik Regional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terisolasi terpencil termasuk di dalamnya buruknya infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak mampu mengakses pasar dan pelayanan publik ➤ Sumber daya alam termasuk di dalamnya
------------------------	--

	<p>kemampuan lahan dan kualitas tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuaca termasuk iklim, kondisi lingkungan, dan lainnya. ➤ Tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen.
<p>Karakteristik Komunitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infrastruktur (air bersih, jalan, listrik dan lainnya). ➤ Distribusi lahan. ➤ Akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lainnya). ➤ Struktur sosial dan modal sosial.
<p>Karakteristik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran rumah

Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum kerja). ➤ Jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia dini. ➤ Asal (lahan, peralatan, alat produksi, rumah dan perhiasan dan lainnya). ➤ Pekerjaan dan <i>income</i> ➤ Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.
Karakteristik Individu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usia. ➤ Pendidikan. ➤ Status perkawinan. ➤ Suku/daerah.

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik.⁵ Indonesia dilihat dari ketiga aspek tersebut sangat kompleks dan multidimensi, dengan mata pencaharian yang beragam keadaan sosial yang unik serta situasi politik yang terkesan tidak stabil menjadikan arah kebijakan pemerintah kurang terukur dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Akan tetapi, Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakatnya. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek.

⁵ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan ...* h. 4 – 5

Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah.

Dengan demikian, kemiskinan dapat pula di pandang sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau turut serta dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi, yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah mereka tidak atau belum mampu mendayagunakan faktor produksi yang mereka miliki. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi, hal tersebut berakibat manfaat pembangunan juga tidak dapat menjangkau mereka.

Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Atau dengan kata lain, masalah kemiskinan ini selain dapat ditimbulkan oleh hal yang bersifat alamiah atau kultural, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang masalah – masalah struktural.⁶

f. Perspektif Islam Tentang Kemiskinan

Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah*

⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 300 – 301

fil hayah. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda – beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

Selain itu, Islam bahkan menjadikan orang fakir yang memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Adapun lima pilar yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain : (1) ilmu para ulama, (2) pemerintah yang adil, (3)

kedermawanan kelompok orang – orang kaya, (4) doanya orang – orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib:

قَبِوا الدُّنْيَا بِخَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَ عَدْلِ الْأَمْراءِ وَ
سَخَاوَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَ دُعَاءِ الْفُقَرَاءِ وَ أَمَانَةِ الْمُحْتَزِّينِ

“Tegaknya urusan dunia dan masyarakat karena lima faktor: ilmu para ulama, adilnya umara (pemerintah), kemurahan orang kaya, doanya orang fakir, dan kejujurnya para pegawai”⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang derajat kemiskinan apabila dibandingkan dengan kekayaan. Paling tidak ada sebagian ulama berpendapat bahwa kemiskinan dan kefakiran lebih baik daripada kekayaan. Diantara argumen yang diajukan adalah beberapa ayat al – Qur’an yang memuji orang – orang yang fakir, diantaranya seperti yang tersurat dalam firman Allah SWT:

⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), h. 70 – 71

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِعِلْمِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

(Apa yang kamu infakan) adalah untuk orang – orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang – orang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri – cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS Al- Baqarah:273)⁸

Islam memandang antara fakir maupun miskin memiliki hak yang sama untuk di bantu, terlepas dari usia mereka tua, muda, dan lansia. Keadaan mereka yang serba kekurangan dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Seseorang disebut fakir jika dia tidak memiliki tenaga untuk

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al – Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Dian Rakyat dan CV Ibnu Usman), h. 46.

bekerja dikarenakan usia maka ia disebut fakir. Sedangkan miskin kondisi dimana seseorang bekerja tapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian juga ada ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengusir orang – orang miskin yang taat kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-NYA:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهًا مَّا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)

Janganlah engkau mengusir orang – orang yang merayu Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berpihak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang – orang yang zalim (QS. Al-An'am: 52)⁹

⁹Lajnah Pentashih Mushaf Al – Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Dian Rakyat dan CV Ibnu Usman), h. 133.

2. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah sebutan bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja, atau orang yang bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu.¹⁰ Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan *income*. Pengangguran tidak hanya bagi mereka yang sama sekali tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya kurang produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Oleh karena itu pengangguran dapat dikatakan suatu kondisi dimana memang seorang individu maupun kelompok yang termasuk dalam angkatan kerja belum mampu memanfaatkan secara maksimal usahanya secara produktif dan atau sama sekali

¹⁰ D.C. Tyas, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 28

tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Masalah Pengangguran

Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang. Sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5.06 juta orang penganggur terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah 9.258.964 orang. *Kedua*, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 6,2%.¹¹

Sementara permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara – negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih rendahnya

¹¹ Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2018), h. 103

tenaga kerja yang mampu di serap optimal ke dunia kerja, sehingga apabila serapan tenaga kerja dari angkatan kerja (*labor force*) yang rendah, maka atinya semakin tinggi pula tingkat pengangguran pada tahun tersebut. Inilah masalah yang sampai dengan sekarang belum terlewati secara tuntas dalam perekonomian nasional yang sudah masuk semester pertama di tahun 2012.

Indonesia sebagai negara besar, di samping memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki sumber daya manusia dalam jumlah yang luar biasa. Apabila penduduk Indonesia di tahun 2015 diperkirakan berjumlah 245 juta jiwa dan diasumsikan usia yang masuk kelompok angkatan kerja yang telah lulus sekolah, mulai orang – orang yang berijazah SD sampai dengan Sarjana berjumlah enam puluh persen dari total jumlah penduduk, maka jumlah angkatan

kerja Indonesia pada tahun 2015 dapat menyentuh angka 150 juta orang.¹²

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB menjadi semakin serius. Dewasa ini, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada negara – negera di Kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin rata – rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan tinggi.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek – aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan

¹² Didin S Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah kebijakan...h*, 114 - 115

kerja di NSB, yang sebenarnya permasalahan tersebut bagaikan “puncak gunung es”. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara penuh (*underutilization*) mempunyai berbagai wujud, termasuk di dalamnya adalah *underemployment* dan pengangguran tersembunyi (*hidden underemployment*). Sekalipun data tentang berbagai bentuk *underemployment* di NSB sangat jarang, namun dari hasil suatu studi menunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari penduduk perkotaan di NSB dapat dikatakan tidak bekerja secara penuh (*underutilized*).¹³

c. Jenis – jenis Pengangguran

Menurut Edwards, pengangguran dapat diklasifikasikan atas lima jenis pengangguran yaitu :

1. **Pengangguran terbuka** : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena

¹³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...* h. 358

mengharapkan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan)

2. **Setengah menganggur** :

(*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan.

3. Tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh : yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yang termasuk disini adalah:

a. **Pengangguran tidak kentara**

(*disguised unemployment*) yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.

- b. **Pengangguran tersembunyi** (*hidden unemployment*): yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - c. **Pensiun lebih awal.** Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pension di permudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.
4. **Tenaga kerja yang lemah** (*impaired*): yaitu mereka yang mungkin bekerja *full time*, namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. **Tenaga kerja yang tidak produktif:** yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena

sumberdaya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan Sesutu dengan baik.¹⁴

d. Jumlah Pengangguran

Sakernas Agustus 2019 mencatat ada 8,13 juta orang setengah pengangguran (orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu (orang yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain).¹⁵

Sedangkan di provinsi Banten dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 6,947 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 7,58 persen pada february 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah

¹⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...* h. 359

¹⁵BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019*. (05 November 2019), h. 1

Kejuruan (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen.¹⁶

e. Perspektif Islam Tentang Pengangguran

Pada dasarnya tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat:56)*¹⁷

Dalam dalil tersebut bahwasanya jelas segala bentuk aktifitas baik bekerja, bermuamalah, dan yang lainnya bertujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Yaitu melakukan apa yang di perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya. Sikap Islam terhadap para pengangguran yang hidup hanya meminta – minta, berpangku tangan tanpa bekerja sangatlah menaruh perhatian terhadapnya. Karena Hal itu sangat

¹⁶BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Banten Februari 2019*, (6 mei 2019), h. 1

¹⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al – Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Dian Rakyat dan CV Ibnu Usman), h.523.

bertentangan dengan perintah Allah dimana tugas sebagai seorang hamba adalah berikhtiar (berusaha) mengupayakan segala sesuatunya dengan bekerja. Namun, harus di garis bawah dalam Islam bekerja bukan hanya menjadi pegawai di suatu perusahaan atau institusi. Dalam Islam konsep bekerja adalah *entrepreneurship* (kewirausahaan). Kewirausahaan bukan hanya sekedar berbisnis dalam arti berjualan (*marketing*). Namun, melakukan kreatifitas apa saja dari mulai hulu produksi sampai penjualan yang dapat menjadi *wasilah* (perantara) datangnya rezeki Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah:105)¹⁸

Oleh karena itu, bekerja adalah suatu bentuk ibadah yang tidak bisa di tinggalkan. Sehingga pengangguran (tidak bekerja) di pandang sebagai suatu bentuk kemalasan, dan di pandang rendah disisi Allah SWT.

Islam sangat menganjurkan umatnya agar mampu menggali sumber daya dalam dirinya sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini. Dengan segala bentuk kreativitas dan inovasi sehingga dapat menghasilkan sumber – sumber ekonomi yang produktif. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠)

Dan sungguh, kami telah menetapkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. Al-A'raf:10)¹⁹

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al – Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Dian Rakyat dan CV Ibnu Usman), h. 203.

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al – Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Dian Rakyat dan CV Ibnu Usman), h. 151.

3. PDRB

a. Pengertian Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat waktu tertentu sebagai tahun

dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, di mana faktor perubahan harga telah di keluarkan.

b. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan masing – masing dijelaskan berikut :

- a) Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara unit – unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan mejadi 9 lapangan usaha (sector) yaitu : 1. Pertanian,

Peternakan, kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa – Jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub – sub sektor.

- b) Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah jasa yang diterima oleh faktor -faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (nalas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal), dan keuntungan (balas jasa kewirasawastaan/*entrepreneurship*); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

- c) Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor neto, (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor – faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di

dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.²⁰

Sedangkan dari sisi permintaan agregat, tinggi rendahnya PDRB dari suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi dari jumlah dan struktur penduduk serta pendapatan riil per orang di wilayah tersebut. Dengan kata lain, dari sisi permintaan agregat (penggunaan), wilayah dengan PDRB yang rendah mencerminkan sedikitnya jumlah penduduk atau lebih banyaknya orang miskin dibandingkan orang kaya atau kombinasi dari keduanya di wilayah itu.²¹

c. Perkembangan PDRB di Provinsi Banten

Pada tahun 2018 perekonomian Provinsi Banten tumbuh sebesar 5,81 persen, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun

²⁰ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2006), h. 78 - 79

²¹ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 205

sebelumnya yang mencapai 5,73 persen. Perkembangan perekonomian Banten tergambar pula dari angka PDRB ADH Berlaku. Pada tahun 2018 PDRB Banten ADH Berlaku telah mencapai 614,91 triliun rupiah, meningkat sebesar 9,13 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 563,46 triliun rupiah.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah industry pengolahan sebesar 31,20 persen, perdagangan sebesar 12,49 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 11,08 persen serta konstruksi sebesar 10,61 persen. Sementara itu lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,08 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0,69 persen, serta jasa perusahaan sebesar 0,69 persen, serta jasa perusahaan besar 1,09 persen.

Lapangan usaha yang kontribusinya mengalami kenaikan paling besar pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya diantaranya adalah konstruksi yang naik sebesar 0,31 persen, transportasi dan pergudangan yang naik sebesar 0,21 persen, serta perdagangan yang naik sebesar 0,20 persen. Sementara itu lapangan usaha yang kontribusinya mengalami penurunan paling dalam pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya adalah industri pengolahan yang turun sebesar 0,73 persen pertanian, kehutanan, dan perikanan yang turun sebesar 0,12 persen, serta komunikasi dan informasi yang turun sebesar 0,11 persen.²²

d. Perspektif Islam Tentang Pertumbuhan Ekonomi

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus –

²²Katalog BPS, *Buku Saku PDRB Provinsi Banten, PDRB Kabupaten/Kota se-Banten, PDRB Provinsi se-Jawa dan PDB Indonesia*, (Serang: CV Dharmaputra, 2019), h. 4

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.²³ Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam ini penuh dengan nilai makna. Sehingga suatu peningkatan terhadap faktor produksi tidak dianggap sebagai suatu pencapaian pertumbuhan ekonomi jika input produksi tersebut terdapat barang – barang yang terbukti memberikan kontribusi dan efek yang buruk dan membahayakan bagi manusia.

Selain itu, Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya mengukur dari jumlah volume barang dan jasa selama satu tahun tanpa memperhatikan aspek *shariah compliance*. Dengan kata lain pertumbuhan ini tidak memperhatikan aspek halal haram, maupun aspek – aspek kesesuaian syariah lainnya. Sebagai contoh, kontribusi jasa keuangan konvensional terhadap

²³ Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam perspektif Islam*, Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1 (November 2018), h.119

PDB Indonesia memberikan hasil yang signifikan dan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.

4. IPM

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.²⁴

Salah satu alat ukur untuk menilai kualitas SDM di suatu negara adalah dengan menggunakan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

²⁴ Yusniah Anggraeni, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), h. 8

ini adalah suatu konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli.²⁵

b. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan manusia yakni :

1. Komponen kesehatan

Dalam indeks pembangunan manusia, komponen kesehatan ini tercermin dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak lahir HIdup (ALH)

²⁵ Irfan syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan..* h. 147

dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup suatu standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

2. Komponen Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan diwakili oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan rata – rata Lama Sekolah. Angka Melek Huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi

sebaliknya. Sedangkan rata – rata lam sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata – rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP).

3. Komponen Daya Beli

Dalam indeks pembangunan manusia komponen daya beli diwakili oleh Pendapatan Perkapita Rill yang disesuaikan yaitu rata – rata pengeluaran perkapita penduduk yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan melalui indeks harga konsumen.²⁶

Khusus posisi negara kita, Indonesia berada di peringkat 108 dengan nilai IPM 0,684 dan masuk kategori *Medium Human Development Index*. Yang menarik, posisi

²⁶ M. Alhudori, “*Pengaruh IPM...*”, h. 5 - 6

Indonesia berada di bawah Palestina yang berada di posisi 107 dengan nilai IPM sebesar 0.686. Untuk ASEAN, negara yang nilai IPM-nya paling tinggi adalah Singapura, di mana negara ini berada di peringkat 9 dengan skor IPM 0.901.²⁷

c. Perspektif Islam tentang Indeks Pembangunan Manusia

Pandangan Islam tentang IPM sesuai yang dikemukakan oleh guru besar IPB Didin Hafidhuddin, bahwa pendidikan sebagai cara meningkatkan kualitas hidup di segala bidang dan hampir tidak ada manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitas, sehingga tujuannya ialah terciptanya *civil society* yang memiliki karakter yang baik (*al insan kamil*).²⁸

²⁷ Irfan syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 148

²⁸ Irfan syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan...*, h. 150

Pilar pembangunan manusia adalah istishlah atau kebaikan/kemaslahatan bagi manusia. Al – Qur'an secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan dimuka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memperhatikan pilar ini. Pelaksanaan pilar bangunan ini hanya memberikan dua rambu yaitu halal dan haram yang masing – masing memiliki konsekuensi yaitu pahala atau dosa.

Kemampuan kejiwaan merupakan sumber daya insani (sumberdaya manusia) yang dimiliki oleh manusia. Dengan seperangkat organ tubuh yang diberikan Allah SWT kepada manusia, manusia mempunyai daya atau potensi (kekuatan) yang apabila dikembangkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan akan menjadikan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya baik tanggung jawabnya

sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah Allah SWT. Manusia mempunyai sumber daya yang meliputi daya tubuh, daya hidup, dan daya akal. Apabila keempat daya tersebut dikembangkan, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam artian beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah Allah SWT.²⁹

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah Penduduk Miskin

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan manusia memiliki tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi

²⁹As'ad Bukhari, "Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi," *jurnal studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (juni 2018) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 6 - 7

kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karenanya suatu daerah di harapkan memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. Maka ketika nilai Indeks Pembangunan manusia tinggi otomatis seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

2. Hubungan antara PDRB dengan Jumlah Penduduk Miskin

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan ekonomi, sehingga menjadi standar ukuran penting untuk menilai keberhasilan dari suatu pembangunan itu sendiri. Akan tetapi PDRB hanya dapat menggambarkan secara umum saja dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga membaiknya PDRB akan mampu memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan. Oleh karenanya semakin tinggi PDRB maka semakin sejahtera penduduk di suatu wilayah. Dengan kata lain dapat mereduksi jumlah penduduk miskin.

3. Hubungan antara Pengangguran dengan Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat pengangguran tinggi akan berdampak buruk bagi kelangsungan ekonomi suatu Negara. Selain itu pengangguran akan menghambat keberlangsungan pembangunan serta meningkatkan tindak kriminalitas dan kemiskinan.³⁰ bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya tanpa di imbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara optimal akan memicu masalah ekonomi. Sehingga jumlah angka penduduk miskin kian bertambah.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian akan ditemukan keterkaitan pada tema penelitian yang dilakukan. akan tetapi hanya arah dan tujuan yang di analisis berbeda. Dari penellitian ini tentunya penulis melakukan kajian – kajian pada beberapa sumber penelitian yang lain mengenai dengan pengarum IPM, PDRB dan

³⁰ Irim Rismi Hastyorini, *Masalah Ketenagakerjaan* (Klaten: Cempaka Putih, 2019) h. 1

pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Alhudori, <i>pengaruh IPM, PDRB dan Pengangguran terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi</i>	<ol style="list-style-type: none"> Variabel IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin Variabel PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin Variabel 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan regresi linier berganda Memiliki Variabel independen dan variabel dependen yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> Periode penelitian 2006 – 2015 Lokasi penelitian dan populasi sampel berbeda

		jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin		
2	I made Tony, sudarsama arka, <i>Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali, 2015</i>	<ol style="list-style-type: none"> Variabel pendidikan, PDRB, perkapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Variabel pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan regresi linier berganda 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen pendidikan Periode penelitian 2007 - 2013

		<p>dan PDRB per kapita secara parsial berpaengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin</p> <p>3. Variabel pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin</p>		
3	<p>Anwar Rasyadi, <i>Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan</i></p>	<p>1 Hasil penelitian ditemukan bahwa PDB berpengaruh signifikan dan bersifat negatif dengan jumlah penduduk miskin</p>	<p>1. Metode analisis regresi Linier Berganda</p> <p>2,Memilikikesamaan pada variabel</p>	<p>1. Periode tahun 1984 - 2009</p>

	<p><i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, 2011</i></p>	<p>2. Hasil penelitian ditemukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin</p> <p>3. Hasil penelitian ditemukan bahwa krisis ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin</p>	<p>depended, yaitu kemiskinan</p>	
4	<p><i>Dio syahrullah, Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan,</i></p>	<p>1.PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten</p> <p>2. Pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan di</p>	<p>1.Variabel independen PDRB dan Pengangguran serta variabel dependen kemiskinan</p> <p>2.Menggunakan</p>	<p>1.Periode penelitian 2009-2012</p> <p>2. Menggunakan variabel X2 Pendidikan</p>

	<p><i>Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten, 2014</i></p>	<p>Provinsi Banten</p> <p>3. Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten</p> <p>4. Secara bersama-sama (smilutan) variabel PDRB, Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Banten pada periode 2009-2012</p>	<p>metode regresi data panel</p> <p>3, Lokasi penelitian di Provinsi Banten</p>	
5	<p>Denni sulistio Mirza, <i>Pengaruh Kemsikinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah,</i></p>	<p>1. Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah</p>	<p>4. Menggunakn data panel gabungan <i>n time series</i> dan <i>cross</i></p>	<p>1. Periode penelitian adalah 2006 – 2009</p>

2011	<p>2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM</p> <p>3. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM</p>	<p><i>section</i></p> <p>5. Memiliki Variabel X1 (kemiskinan) yang sama</p>	<p>2. Mengungkapkan Variabel dependen IPM</p>
------	--	---	---

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah ini telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.³¹

Berdasarkan kajian – kajian yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha¹ : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten periode 2014-2019.

Ha² : PDRB berpengaruh terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten periode 2014-2019.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 64.

Ha^3 : Jumlah Pengangguran berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten periode 2014-2019.

Ha^4 : IPM, PDRB, dan jumlah Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten periode 2014-2019.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh 3 variabel pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, antara lain IPM, laju PDRB dan jumlah pengangguran. IPM sebagai indikator pembangunan manusia di Provinsi Banten. PDRB sebagai Indikator pertumbuhan ekonomi dan jumlah Pengangguran sebagai indikator kesejahteraan.

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen akan di regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu mempengaruhi penduduk miskin. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Provinsi Banten untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Maka skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

